

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu peranan yang paling penting bagi kehidupan seseorang, pendidikan juga bisa diartikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Menurut Makkawaru (2019) pendidikan merupakan segala aspek kehidupan karena membantu individu dan kelompok meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memilih dan membangun gaya hidup yang sesuai dengan martabat manusia. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi individu atau kelompok lewat pembelajaran, pembinaan dan pengalaman, tujuannya yaitu untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Nugraha (2019) mengatakan bahwa pendidikan juga dapat dipahami sebagai proses pengembangan yang berfokus pada individu atau kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk meningkatkan potensi dan kualitas hidup mereka. Pendidikan sangat penting untuk membentuk dan menentukan masa depan individu dan masyarakat. Dengan pendidikan, seseorang bisa mengembangkan potensinya, meningkatkan kualitas hidup, dan mendapat peluang untuk sukses di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Ratnawati et al (2013) Pendidikan sangat penting di era globalisasi saat ini karena membentuj generasi berkualitas untuk masa depan.

Program Pendidikan Wajib 12 Tahun merupakan inisiatif pemerintah yang sangat penting untuk mendidik generasi penerus dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Program Pendidikan Wajib 12 Tahun di Indonesia adalah inisiatif pemerintah untuk memperluas akses individu terhadap pendidikan, khususnya di tingkat menengah, menurut Alfian Khadafi dkk. (2025). Setiap warga negara Indonesia dijamin menerima pendidikan dasar melalui pelaksanaan pendidikan wajib. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan wajib adalah pendidikan minimal yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, dan merupakan tugas pemerintah daerah. Setiap warga negara yang telah menyelesaikan SMP atau sederajat memiliki

kewajiban untuk mengikuti program wajib belajar dua belas tahun. Mereka yang berusia antara enam belas tahun dan delapan belas tahun dapat lanjut ke sekolah menengah atas atau sederajat sampai tamat (Rahmanti A, 2012). Tujuan dari program wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia ini yaitu agar lebih banyak lagi anak-anak yang melanjutkan sekolah, untuk meminimalisir angka putus sekolah, dan juga memastikan bahwasannya mereka lulus dengan minimal di jenjang SMA/SLTA Sederajat. Hal ini juga diperkuat oleh Hasanah et al (2017) yang mengatakan bahwa tujuan program wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi semua anak dengan fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), pengurangan Angka Putus Sekolah, peningkatan angka melanjutkan (AM), dan memastikan anak lulus minimal SMA/SMK atau sederajat, program ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan.

Kesenjangan dalam bidang pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks terutama di daerah terpencil. Hal yang menjadi salah satu faktor penyebab masalah ini terjadi yaitu kurangnya pemerataan pendidikan oleh pemerintah. Menurut Seputar et al (2025) pemerataan pendidikan memiliki artian semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa memandang latar belakang geografis, sosial, atau ekonomi keluarga mereka. Tujuannya adalah menjadikan pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional dan menciptakan sumber daya manusia yang baik. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di daerah terpencil, pemerintah telah memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah suatu program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan bersyarat. Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan tertentu dan bersedia untuk melakukan beberapa hal, yaitu menyekolahkan anak, melakukan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil atau balita, dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada

keluarga atau individu yang kurang mampu dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH (Nurhanifa Karunia, 2024). Program Keluarga Harapan menurut Nadini (2018) merupakan program bantuan sosial yang membantu keluarga yang telah mencapai Tingkat kesejahteraan. Selain dampak positif, penyaluran bantuan sosial juga dapat memiliki dampak negatif. Dampak negatif seperti konflik sosial antara penerima bantuan yang terjadi karena penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Pendamping Sosial adalah salah satu pihak yang sangat penting dalam menghentikan konflik seperti itu.

Pendamping sosial adalah orang-orang yang membantu masyarakat berkembang. Menurut Lidia dalam Rahmadila, (2023:16), pendamping sosial berperan sebagai kolaborator, inspirasi, dan pemecah masalah bagi masyarakat. Mereka membantu masyarakat mengembangkan bakat dan kapasitas mereka serta mendorong mereka untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan. Selain itu, pendamping sosial membangun ikatan kepercayaan dengan anggota masyarakat, menemukan kebutuhan mereka, dan memberikan bantuan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Akibatnya, pendamping sosial memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peran ini sangat penting dalam program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah. Agar Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil, Pendamping PKH sangat penting. Menurut Nadini (2018), Kementerian Sosial mempekerjakan dan mengontrak pendamping PKH sebagai mitra pemerintah untuk memberikan dukungan di tingkat kecamatan. Penerapan pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan keterlibatan pendamping sangat penting bagi keberhasilan PKH. Kementerian Sosial (2009) mendefinisikan bantuan sosial sebagai suatu proses yang membantu klien mengakses berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengatasi kesulitan, dan meningkatkan dukungan. Menurut Nadilla dkk. (2022), pendamping PKH memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap keberhasilan program di lapangan. Menurut Azim, M.H.

(2024), pendamping PKH melaksanakan program ini di tingkat kecamatan. Pendamping sangat penting karena sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan, suara, dan wewenang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sebenarnya. Masyarakat miskin ini membutuhkan dukungan dari seseorang yang dapat membela hak-hak mereka. UPPKH Distrik/Kota tidak mampu melaksanakan tugas PKH secara bersamaan di semua tingkat kecamatan. Jumlah petugas yang bertugas sangat sedikit sehingga sulit untuk mengidentifikasi setiap masalah dan mengambil tindakan segera. Oleh karena itu, pendamping PKH sangat penting untuk keberhasilan program ini dan tujuannya.

Menurut Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 35.494 orang yang tersebar di sepuluh kecamatan, tercatat juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tamansari sebanyak 6.094 pada tahun 2022. Berdasarkan Kecamatan Tamansari dalam angka (2022), Kecamatan Tamansari terdiri dari 8 Kelurahan Mugarsari, Setiamulya, Mulyasari, Setiawangi, Sukahurip, Sumelap, dan Tamanjaya. Sedangkan jumlah penduduk 79.622 jiwa. Pada tahun 2022 Kelurahan Sumelap berpenduduk 5.815 jiwa. dan Sebagian besar penduduk Kelurahan Sumelap yang menerima KPM berprofesi sebagai Petani dan Buruh Tani. Dalam bidang Pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Karena itu, peran Pendamping PKH sangat penting agar program tersebut sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan berjalan sesuai dengan rencana. Di Kelurahan Sumelap, Permasalahan peran pendamping PKH dalam mendampingi masyarakat menjadi sorotan utama, terutama dalam membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan bantuan PKH secara efektif untuk mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun.

Meskipun banyak penelitian telah membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Wajib Belajar 12 Tahun, masih ada kesenjangan yang perlu diperhatikan. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek kebijakan dan hasil program secara umum, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa menyelidiki secara rinci tentang bagaimana peran pendamping PKH dilaksanakan di lapangan. Selain itu, studi yang secara

langsung mengaitkan peran pendamping PKH dengan keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun juga masih jarang, terutama dalam hal bagaimana pendamping mendukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memahami, memanfaatkan, dan mengoptimalkan bantuan yang mereka terima untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak. Di sisi yang berbeda, studi yang membahas konteks lokal, terlebih di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, masih sangat terbatas, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana fungsi pendamping PKH dilakukan dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji peran pendamping PKH sebagai perubahan dalam membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan bantuan PKH secara optimal, khususnya dalam mendukung keberhasilan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Oleh karena itu, penelitian ini terutama berfokus pada bagaimana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menangani masalah-masalah tersebut. Isu yang harus dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memenuhi tugas mereka sebagai agen perubahan dengan membantu masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan bantuan PKH dengan baik, khususnya dalam mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pendamping PKH berkontribusi pada efektivitas program dan memberikan dukungan. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pendamping PKH dapat mendukung tujuan pembangunan masyarakat dan meningkatkan efektivitas bantuan. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, penulis menemukan penelitian "**Peran Pendamping Program Keluarga Harapan pada Program Wajib Belajar 12 Tahun**" (Studi di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya)" sebagai topik yang menarik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti kemudian merumuskan masalah penelitian ini, yakni: Bagaimana peran pendamping program keluarga harapan pada program wajib belajar 12 tahun di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah istilah yang memiliki arti atau pengertian tertentu yang digunakan sebagai pedoman oleh penulis. Agar judul penelitian yang dipilih tidak disalahartikan, berikut adalah definisi operasional penulisan ini:

1.3.1 Peran Pendamping

Peran adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau tugas tertentu. Kewajiban dan kedudukan seseorang dalam masyarakat menjadi tidak jelas jika mereka tidak memiliki posisi. Dengan memberikan dukungan dan dorongan, seorang pendamping membantu masyarakat yang mereka layani dalam melaksanakan kewajiban sosial mereka. Pendamping PKH sangat penting di kecamatan karena sebagian besar penduduk miskin tidak memiliki wewenang dan hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Tugas utama pendamping PKH di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, adalah membantu keluarga penerima PKH dalam verifikasi data, memberikan nasihat, memantau dana bantuan, dan melaporkan kemajuan kepada kecamatan atau organisasi lain.

1.3.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program perlindungan sosial yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH adalah untuk membuat layanan penting lebih mudah diakses oleh keluarga berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan menawarkan transfer tunai, PKH membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam mengurangi beban keuangan mereka dan mendorong peningkatan standar hidup mereka dengan menciptakan rumah tangga yang menyediakan layanan kesehatan. Meskipun tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, peran pemerintah tetap sangat penting untuk keberhasilannya, dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat.

1.3.3 Program Wajib Belajar

Program Program wajib Belajar adalah program yang diawasi oleh pemerintah masing-masing negara. Program wajib belajar ditetapkan oleh kebijakan

pemerintah nasional. Pembelajaran didefinisikan sebagai kumpulan hasil pembelajaran yang menunjukkan apa yang telah dipelajari siswa. Hasil pembelajaran seringkali mencakup perspektif, kemampuan, dan pengetahuan baru yang diharapkan diperoleh siswa. Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam program wajib belajar. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan dukungan kesehatan dan pendidikan kepada keluarga sangat miskin (RTSM). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap layanan yang dibutuhkan sehingga mereka dapat mengakhiri siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memberikan dukungan tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah, PKH mengurangi beban keuangan mereka dan mendorong pembangunan rumah dengan layanan kesehatan, yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan, tetapi masyarakat belum sepenuhnya terlibat, dan peran pemerintah masih sangat penting untuk keberhasilannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta komprehensif mengenai bagaimana fungsi dan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, khususnya dalam mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program wajib belajar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara lebih rinci sejauh mana kontribusi para pendamping PKH dalam memberikan motivasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat agar dapat memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan program wajib belajar yang telah ditetapkan..

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Dapat meningkatkan pemahaman teoretis yang lebih komprehensif mengenai peran strategis pendamping PKH dalam mendukung implementasi program wajib

belajar 12 tahun, khususnya dalam upaya memperluas akses, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pemahaman ini tidak hanya mencakup tugas-tugas administratif, tetapi juga menyoroti fungsi pendamping sebagai fasilitator yang membantu keluarga mengakses layanan pendidikan, sebagai motivator yang mendorong kesadaran pentingnya pendidikan, serta sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara keluarga penerima manfaat dengan pihak sekolah maupun pemangku kebijakan terkait.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pendamping PKH

Membantu meningkatkan efektivitas mendukung program wajib belajar.

b. Bagi KPM

Sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan program wajib belajar di lingkungan keluarga mereka.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap program wajib belajar 12 tahun.